

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada umumnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik, dan bentuk-bentuk kerjasama yang baik dalam unit-unit di lingkup intern BPBD sendiri maupun dengan SKPD/Lembaga/Instansi terkait/*stakeholders*/organisasi maupun dengan Instansi vertikal sudah berjalan cukup baik dan apabila masih ada beberapa kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut.
2. Adanya komitmen oleh pemangku kepentingan(*stakeholders*) di Kabupaten Karanganyar terhadap bidang kebencanaan sangat dihargai dan apresiasi tinggi, sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Adanya dukungan pembiayaan yang cukup untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah menjadi prioritas dalam penyusunan APBN, dalam hal ini BNPB, untuk penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana sangat berpengaruh atas kinerja BPBD.
4. Pengelolaan program, kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik, akuntabel dan transparan serta mendapatkan assistensi dari lembaga pemeriksa sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
5. Penganggaran untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di setiap tahapan yang memadai diperlukan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara ideal dan berkesinambungan.

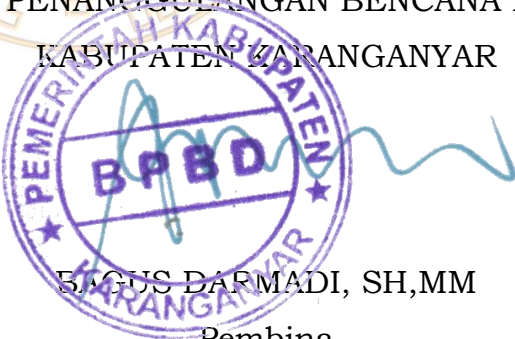
B. SARAN

1. Agar dapat lebih ditingkatkan kerjasama, koordinasi dengan SKPD/lembaga/ instansi terkait/stakeholder/organisasi maupun dengan instansi vertikal yang sudah berjalan cukup baik untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahun-tahun mendatang.
2. Agar ditingkatkan kesejahteraan bagi para pegawai di lingkungan BPBD yang tanpa memandang waktu, tenaga, pikiran dan kepentingan pribadi serta keluarga, tetap semangat dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana selama 24 jam tanpa jeda, berupa :
 - a. kenaikan indeks uang makan dan asupan gizi, karena sudah tidak relevan dengan tingkat kebutuhan gizi dan harga bahan pokok kebutuhan hidup;
 - b. pemberian asuransi jiwa bagi SATGAS PB;
 - c. pengadaan seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) I, PDL II dan Pakaian Dinas Harian Khusus (PDHK) beserta kelengkapannya, sebagai simbol, identitas, sarana pembinaan disiplin, jati diri dan semangat pengabdian;
 - d. pemberian insentif jaringan komunikasi;
 - e. kenaikan indeks uang piket dan evakuasi bencana;
 - f. pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) kepada personal SATGAS sesuai bidang keahliannya dalam rangka *safety* dan kelancaran evakuasi.
3. Alokasi anggaran yang memadai pada APBD untuk setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Alokasi anggaran melalui Bantuan Sosial dan Keuangan kepada Forum PRB dan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang

- kebencanaan, sebagai pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
5. Segera untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan yang belum dapat terlaksana atau yang sudah terlaksana namun masih terdapat kekurangan, khususnya amanat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang telah dapat ditetapkan pada akhir tahun anggaran 2021 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan urusan kebencanaan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar.
 6. Peningkatan kelembagaan atau struktur organisasi dan tata laksana BPBD menjadi klasifikasi "A".
 7. Optimalisasi peran Forum PRB dalam membantu tugas-tugas BPBD dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dan Peraturan Daerah.

Karanganyar, Desember 2021

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


AGUS DARMADI, SH,MM

Pembina

NIP. 19650406 198803 1 011

